

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah serta Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mengukur dan menyusun Renstra OPD dalam lima tahun kedepan dan pada tiap tahunnya disusunlah rencana kerja (Renja) Badan Penghubung Provinsi yang mengacu pada Renstra Badan Penghubung Provinsi tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra OPD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang telah disepakati Renstra SKPD mengacu pada penjabaran dari RKPD yang memuat :

1. Visi misi OPD terhadap penjabaran Visi dan Misi Provinsi Maluku.
2. Program kerja OPD, sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan dan membentuk program-program sesuai kewenangan lokalitas OPD, lintas OPD dan program kewilayahan sebagai pelaksana tugas dan fungsinya.
3. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjelasan dan program OPD, lintas OPD dan program kewilayahan yang dilengkapi indikasi pendanaan.
4. Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan tata ruang.

Dengan demikian Renstra OPD yang menjabarkan permasalahan daftar program yang akan dilaksanakan untuk menegaskan permasalahan Daerah secara terencana dan berkelanjutan melalui pembiayaan APBD dengan fungsi yang dimiliki dan sesuai dengan prioritas kebutuhan kebijakan dan program strategis yang ada di Renstra Badan Penghubung Provinsi Maluku tersebut dimaksud untuk merealisasikan pencapaian Visi Maluku Terkelola secara jujur, Bersih .

B. Landasan Hukum

Renja Badan Penghubung Provinsi Maluku ini mengacu pada dasar Hukum Renstra Provinsi tahun 2019-2024 yang disusun berdasarkan ;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617) ;
3. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

5. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah;
8. Undang – Undang 27 tahun 2012 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubahh dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Daerah kepada Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku No 4 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Maluku no 06 tahun 2016 tanggal 7 desember 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Provinsi Maluku dan peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2017 tanggal 31 Maret 2019 Tentang kedudukan, tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku.
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor : 10 Tahun 2021 tanggal 31 desember 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
16. Peraturan Gubernur no : 80 Tahun 2020 tanggal 31 desember tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021.

C. Maksud dan Tujuan.

Maksud;

Renja Badan Penghubung adalah Dokumen Perencanaan Badan Penghubung Provinsi untuk periode 1(satu) tahun yang disusun denan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan lingkup Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

Tujuan;

Penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi bertujuan;

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024
 - b. Menyediakan sarana pengendalian Program dan Kegiatan Tahun 2024
 - c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan di laksanakan oleh Badan Penghubung provinsi Maluku di Jakarta Tahun 2024 sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya.
- D. Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Maluku, agar substansi pada Bab-bab berikutnya dapat di pahami dengan baik.

1.1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Penghubung, Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Badan Penghubung dengan dokumen RKPD, Renstra Badan Penghubung dan tindak lanjutnya sebagai Proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Penghubung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Badan Penghubung

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok-Pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan penghubung, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGHUBUNG TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penghubung tahun lalu dan capaian Badan Penghubung.

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penghubung Provinsi Tahun lalu berdasarkan data LKPJ.

2.2. Perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2022) mengacu pada APBD tahun berjalan.

- 2.3. Pencapaian Target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja Badan Penghubung tahun tahun sebelumnya yang di sajikan dalam bentuk table T-C 29
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penghubung yang berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penghubung berdasarkan :
1. Indikator kinerja yang sudah di tentukan dalam SPM
 2. Indikator Indikator Kunci (IKU Daerah dan IKU Badan Penghubung).
 3. Capaian kinerja urusan yang di sajikan dalam Tabel T-C 30 Permendagri no 86 tahun 2017.
- C. Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi yang berisikan uraian mengenai :
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Badan Penghubung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Penghubung .
 2. Permasalahan dan hambatan yang di hadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan penghubung
 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan badan Penghubung.
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- D. Review usulan Program dan kegiatan Badan Penghubung yang berisikan uraian mengenai :
- a. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (Renstra);dengan menyajikan Tabel T-C 31 sesuai Permendagri 86 tahun 2017.
 - b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut.
 - c. Penjelasan temuan – temuan setelah analisis kebutuhan renstra dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD .
- E. Penelaan usulan Program Kegiatan Masyarakat.
- Di uraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang di usulkan para pemangku kepentingan ,baik dari kelompok masyarakat ,LSM , asosiasi-asosiasi maupun pokok pikiran DPRD.
- a. Tujuan dan Sasaran Renja
Perumusan tujuan dan sasaran di dasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang di kaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra .
 - b. Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai :
 - a. Faktor -faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan.

- b. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan yang meliputi; jumlah program kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan dan total kebutuhan dana/Pagu indikatif yang di rinci menurut sumber pendanaanya.
- c. Penejelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. PENUTUP

Menjelaskan catatan – catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaanya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2023 di perlukan Evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2023. Pada Tahun 2022 Badan Penghubung provinsi Maluku di Jakarta melaksanakan sebanyak 2 (dua) Program dengan dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp.20.447.827.683 (Dua Puluh Milyar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga rupiah) realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 16.018.841.872,- (Enam Belas Milyar delapan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) atau sebesar 78,3% 9, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.428.985.811-.(Empat Milyar Empat Ratus Dua puluh Delapan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sebelas Rupiah) . Secara detail pelaksanaan untuk untuk program-program Badan Penghubung Provinsi tahun 2022 dapat di berikan gambaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

1.1. Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.14.721.282,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.196.282 (1,33%) dan fisik 100%, sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 14.525.000,- Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi kantor

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.36.218.564,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.24.323.864 (67,16%) dan realisasi fisik (100%), sehingga terdapat sisa sebesar Rp.11.894.700,-. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Tingkat kesesuaian Dokumen RKA SKPD

Hasil (Outcome) :

Kelancaran Tugas tugas Administrasi Kantor

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.36.049.764,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.25.613.076- (71,05%) dan fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.10.436.688,-. Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Tingkat Kesesuaian Dokumen RKA Perubahan

Hasil (Outcome) :

Kelancaran Tugas tugas Administrasi Kantor

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.36.749.764,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 26.888.004,- (73,2%) . Sehingga Terdapat sisa anggaran Rp.9.861.760,- . Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Tingkat Kesesuaian Dokumen DPA SKPD

Hasil (Outcome) :

Kelancaran Tugas-tugas Administrasi Kantor

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.36.378.019,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.24.658.159,- (67,8%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp.11.719.8602,- Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Tingkat Kesesuaian Dokumen DPA Perubahan

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan Tugas-tugas Administrasi Perkantoran

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.30.150.001,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.24.295.683,- (80,1%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp.5.854.318,- Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Tingkat Kesesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

a. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 64.200.000- dengan realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp.64.200.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%. Tidak ada sisa anggaran, Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Terlaksananya hasil pengujian verifikasi Keuangan SKPD

Hasil (Outcome) :

Kelancaran Tugas – tugas Administrasi Perkantoran

b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.44.354.001,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.36.506.964,- (82,3%) dan realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa sebesar Rp.7.847.037,-. Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

- Terlaksananya Sistem Akuntansi Yang Bertanggungjawab

Hasil (Outcome) ;

Kelancaran Tugas – tugas Administrasi Perkantoran

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.37.161.627- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.15.229.727,- (40,9%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.21.931.900,- Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut:

Keluaran (Output) :

Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Hasil (Outcome) :

Kelancaran Tugas – tugas Administrasi Perkantoran

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.37.161.627- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.22.470.054,- (60,5%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.14.691.573,- Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut:

Keluaran (Output) :

Tersusunya Laporan Keuangan Semesteran

Hasil (Outcome) :

Kelancaran Tugas – tugas Administrasi Perkantoran

e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.16.294.350,- dengan realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp.14.880.050,- (91,3%) dan realisasi fisik 100%, sehingga tidak terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.414.300,- capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut:

Keluaran (Output) :

Tersusunnya Laporan Dan Analisis Prognosis

Hasil (Outcome) :

Kelancaran Tugas – tugas Administrasi Perkantoran

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.

1.4

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.8.909.354,- dengan realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp.8.909.354,- (100%) dan realisasi fisik 100%. Tidak ada sisa anggaran, Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut:

Keluaran (Output) :

Tersusunnya RKBU Milik Daerah

Hasil (Outcome) :

Kelancaran Tugas – tugas Administrasi Perkantoran

b. Pengamanan Barang Milik Daerah.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.250.076.256,- dengan realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp.250.076.256,- (100%) dan realisasi fisik 100%. Tidak ada sisa anggaran, Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut:

Keluaran (Output) :

8 orang tenaga Keamanan

Hasil (Outcome) :

Keamanan Kantor Terjaga

c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.39.607.727,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.17.079.427,- (43,1%) dan realisasi fisik 100%, sehingga tidak terdapat sisa anggaran sebesar Rp.22.528.300,- Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Terekonsiliasinya Laporan Barang milik Daerah dan laporan Keuangan

Hasil (Outcome) ;

Tersusunnya Laporan barang Milik Daerah .

1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

a. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.36.582.000- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 30.470.900,- (83,3%) dan realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.6.111.100,- . Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Tingkat Kesesuaian Data Pegawai.

Hasil (Outcome) :

Terealisasinya Urusan Kepegawaian.

1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah.

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.166.135.200,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai mencapai Rp.16.121.568,- (9,7%) dan fisik 100%, sehingga terdapat sisa sebesar Rp.150.013.632,-. Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) : 50 buah Balon Lampu, 5 buah Balon merkuri,45 buah Bateray uk Kecil,4 lusin Battery uk sedang,300M kabel NYM 1,5mm, 43 buah Lampu Neon 10 watt, 45 Buah Lampu neon 20 watt,10 buah Lampu Neon 40 watt,10 buah sekring phase.

Hasil (Outcome) :

Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi kantor

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.1.225.683.200,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 1.218.048.838,- (99%) dan realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.7.634.362,- . Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran Pelaksanaan Tugas-Tugas Kantor.

c. Penyediaan Bahan Logostik Kantor.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.36.839.535,- dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 27.255.097-(74%) sehingga terdapat sisa sebesar Rp.9.584.438,-dan fisik 100% Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Tersedianya Alat Tulis Kantor berupa;100 lembar Amplop Coklat E.312, 10 dos Amplop Coklat Jaya Besar,25 Ampolop Putih Kecil, 10 buah Ballpoint Pilot BPT G.L,7 buah Buku Ekspedisi,5 buah buku kwitansi biasa,5 buah buku Kwitansi Proyek 3 ttd,2 dos CD RW, 5 buah Gunting Kecil,8 buah gunting sedang,11 buah Hekter Max no 10, 6 kotak Cutter besar,6 kotak cutter Kecil,15 dos isi hekter kecil, 8 dos isi hekter sedang ,4 buah Kalkulator,13 buah Karet Penghapus,4 buah keranjang sampah plastic,5 buah keranjang surat besi,155 rim kertas folio 70 gram,150 rim kertas HVS kwarto 70 gram,19 rol Lakban(1 jilid),50 roll lakban bening,25 roll lakban coklat,5 buah Lem UHU Besar,15 buah lem uhu kecil,100 buah Map batik Kecil,10 buah Map Duduk Besar,8 buah Map Duduk Kecil,20 buah Map Plastik SN,18 buah Map Tali Plastik,100 buah materai 10 ribu, 3 buah pembolong Kertas,31 Batang Pensil 2b,15 buah Retype(tip-Ex),5 Pak Spidol 12 warna,10 buah Spidol Artline 100,6 buah Spidol tinta Emas Besar,10 buah Stabilo Boss,4 botol Tinta Bantalan Cap Besar.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran Tugas-Tugas Administrasi Perkantoran.

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.44.250.000,- dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 22.700.037,- (51,3%) dan fisik 100%,sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.21.549.963,-.Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

10 buah Papan Ucapan, 250 lembar Amplop Linen,5 pak amplop Gubernur Kecil,5 pak Amplop Gubernur Sedang,4 pak Amplop Gubernur besar,5 pak amplop sekda besar,5 pak amplop sekda kecil,5 Pak amplop sekda sedang, 6 rim kop garuda emas,8 buku Disposisi,350 lembar Map logo Badan, 100 lembar Map Logo Mas.

Hasil (Outcome) : Kelancaran tugas-tugas administrasi perkantoran.

e. Fasilitas Kunjungan Tamu.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.24.000.000,- dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp.23.600.665- (98,3%), dan fisik 100%,- sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 399.335,- Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Tersedianya makan minum Tamu

Hasil (Outcome) : kunjungan tamu terfasilitasi.

f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.97.200.000,- dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp.88.720.111,- (91,3%), dan fisik 100%,- sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 8.479.889,- Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Hasil (Outcome) : Kelancaran Rapat-rapat kedinasan.

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.30.000.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.30.000.000,- (100 %) dan realisasi fisik 100%, Tidak ada sisa anggaran. Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut:

Keluaran (Output) :

Tersedianya Jasa Surat Menyurat berupa 81 paket pengiriman Barang kepala daerah

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan Tugas-tugas administrasi Kantor

b. Penyediaan jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 671.400.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.428.106.728,- (63,8%) dan fisik (78,5%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp.243.293.272,- . capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (output):

Tersedianya jasa komunikasi 2 saluran dan penerangan Gedung Wisma Maluku ,Anjungan Maluku dan rumah Dinas .

Hasil (outcome):

Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.500.152.512,- dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp.463.683.058,- (92,7%) dan realisasi fisik (100%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp.36.469.454,- capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Tersedianya 9 orang jasa tenaga sopir, 7 orang petugas kebersihan.

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan perkantoran.

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.884.850.000,- dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp.607.049.603- (68,6%).terdapat sisa anggaran sebesar Rp.277.800.397,- Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

5 unit kendaraan dinas jabatan roda empat terawat dengan baik, Tersedianya 33.000 liter bahan bakar untuk 5 unit kendaraan, , Jasa Tol dan Parkir untuk 5 Unit kendaraan roda empat.

Hasil (Outcome) :

Memperpanjang masa pakai kendaraan operasional dan kelancaran tugas-tugas operasional kantor.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan .

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.550.943.500 dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 1.226.697.449,- (79%).terdapat sisa anggaran sebesar Rp.324.246.051,- Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

7 unit Kendaraan Dinas Operasional roda Empat Terawat Baik, Tersedianya 45.150 liter bahan bakar untuk 7 unit kendaraan Dinas operasional, jasa Tol dan Parkir Untuk 7 Kendaraan Roda Empat.

Hasil (Outcome) :

Memperpanjang masa pakai kendaraan operasional dan kelancaran tugas-tugas operasional kantor.

c. Pemeliharaan/ Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.8.725.276.400. dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 6.321.753.672,- (72,5%).terdapat sisa anggaran sebesar Rp.2.403.522.728,- Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output)

- Pemeliharaan Basement Anjungan Daerah Maluku
- Pemeliharaan Rumah Dinas
- Pemeliharaan Kantor Badan Penghubung

Hasil (Outcome) :

- Gedung Anjungan Daerah Maluku, Rumah Dinas dan Kantor Penghubung

d. Pemeliharaan/ Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.149.550.000-.dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp.50.069.705,- (33,5%).terdapat sisa anggaran sebesar Rp.99.480.295,-.

- Terpeliharanya Alat kantor dan Rumah tangga Gedung Kantor

Hasil (Outcome) :

- Memperpanjang masa pakai Srana Prasaran Gedung kantor.

2. Program Pelayanan Penghubung

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.108.000.000-.dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp.35.543.462,- (33%).terdapat sisa anggaran sebesar Rp.72.456.538,- Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output)

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hasil (Outcome) :

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sumber daya pelayanan.

b. Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.316.549.000,-.dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp.305.913.537,- (96,5%).terdapat sisa anggaran sebesar Rp.10.635.463,- Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut ;

Keluaran (Output) :

Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kulaitas pelayanan Badan Penghubung

c. Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.512.672.400,-.dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp.422.759.361,- (82,5%).terdapat sisa anggaran sebesar Rp.89.913.039,- Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut ;

Keluaran (Output) :

Tersedianya Fasilitas Promosi Daerah dan pelestarian Seni budaya

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kunjungan Wisatawan ke Daerah

d. Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.300.852.630,-.dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp.265.908.109,- (88,4%).terdapat sisa anggaran sebesar Rp.34.944.521,- Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut ;

Keluaran (Output) :

Terwujudnya Promosi serta pelestarian Seni budaya

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kunjungan Wisatawan ke Daerah

e. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.1.808.441.160,-.dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp.1.403.742.463,- (86,4%).terdapat sisa anggaran sebesar Rp.404.698.697,- Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut ;

Keluaran (Output) :

Terlaksananya Rapat Koordinasi Bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

Hasil (Outcome) :

Tersinkronisasi hubungan antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat.

Uraian di atas dapat disajikan dalam tabel Capaian Program berikut :

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Provinsi Maluku yang terdapat pada visi misi RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024 maka Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta yang merupakan Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah telah menetapkan sasaran dan target Kinerja dengan langkah-langkah yang berisi Program-Program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta tidak terlepas dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku, hal ini dapat dilihat dari komponen yang menjadi tolok ukur yaitu :

- a. Meningkatnya pelayanan tugas- tugas sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Maluku di Jakarta. Tugas-tugas pelayanan sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Maluku selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan yang berarti dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak kegiatan yang diikuti dan difasilitasi oleh Badan Penghubung Provinsi di Jakarta pada tingkat Nasional. Hal ini semakin dapat menunjukkan peran penting dari Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta walaupun dengan segala keterbatasan wewenang yang dimiliki tetapi Badan Penghubung Provinsi Maluku berusaha untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai Perwakilan Daerah Provinsi.
- b. Pengelolaan Kantor dan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Kebijakan pengelolaan Kantor dan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah diarahkan pada peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. Implementasinya dapat dilihat bahwa banyak masyarakat asal Daerah Maluku dan pejabat Pemerintah Daerah Maluku yang dibantu dan difasilitasi sesuai dalam pelaksanaan tugas sebagai perwakilan Daerah Provinsi Maluku di Jakarta.
- c. Badan Penghubung Maluku di Jakarta akan menindaklanjuti tantangan kinerja tahun lalu untuk di rencanakan ulang pada tahun berikutnya yaitu untuk menjadi pusat informasi maluku di Jakarta artinya untuk menyediakan informasi di pusat dan dan di daerah sebagai bahan untuk kerjasama.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta antara lain:

1. Keterbatasan wewenang yang di berikan kepada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta;
2. Belum dipahaminya arti penting Badan Penghubung sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku di ibukota;
3. Belum optimalnya koordinasi antara OPD di daerah dengan Badan Penghubung;
4. Masih kurangnya partisipasi daerah Kabupaten/Kota dalam berkoordinasi dan mengikuti kegiatan yang di lakukan oleh Badan Penghubung Provinsi Maluku;
5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman akan arti pentingnya Badan Penghubung;

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

1. Tingkat kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta belum dapat memenuhi target yang semula ingin dicapai disebabkan oleh ketidaksinergitas program antara Badan Penghubung Provinsi dengan Kabupaten Kota.

Program yang bersinergi antara Badan Penghubung Provinsi dengan Kabupaten/Kota sangat penting mengingat Badan Penghubung Provinsi Maluku sebagai Pintu Utama pelayanan yang ada di Jakarta. Jika program-program dapat bersinergi dengan baik maka tingkat pelayanan Badan Penghubung Provinsi akan lebih baik. Dengan dibukanya Kantor Perwakilan Kabupaten di Jakarta membuat pelayanan 1 pintu tidak dapat berjalan dengan baik atau terkotak kotak.

Program kegiatan Badan Penghubung Provinsi di Bidang promosi misalnya, tidak mendapat respon positif dari Kabupaten kota, sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri. Apabila Kabupaten Kota dapat mendukung program Badan Penghubung Provinsi maka secara bersama-sama dapat mempromosikan Maluku dengan lebih baik.

2. Permasalahan dan hambatan

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta antara lain:

1. Keterbatasan wewenang yang di berikan kepada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta;
2. Belum dipahaminya arti penting Badan Penghubung sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku di ibukota;
3. Belum optimalnya koordinasi antara OPD di daerah dengan Badan Penghubung;
4. Masih kurangnya partisipasi daerah Kabupaten/Kota dalam berkoordinasi dan mengikuti kegiatan yang di lakukan oleh Badan Penghubung Provinsi Maluku;
5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman akan arti pentingnya Badan Penghubung;

Isu isu Strategis;

Dalam analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana Pembangunan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah di lakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas dapat di operasionalkan dan dapat di pertanggungjawabkan.

Isu-Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus di perhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan Pembangunan karena dampaknya yang signifikan Bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian besar atau sebaliknya, dalam

hal tidak di manfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan pada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan Daerah perlu di selenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab. Beberapa permasalahan yang ada saat ini merupakan hal yang sangat mendasar untuk segera di atasi agar tidak menjadi kendala di masa depan yang akan menghambat tercapainya tujuan. Fokus perhatian kepada Sumber Daya Aparatur, Saran Prasarana maupun sistem yang ada menjadi isu dan Permasalahan strategis ke depan.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi di bidang pemerintahan umum secara umum, maka isu strategis berkembang saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas umum Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta yaitu;

1. Belum terwujudnya penyetaraan eselonisasi yang mana jabatan kepala Badan Penghubung sebagai jabatan administrator menjalankan tugas fungsi dan perannya sebagai perwakilan Pemerintah Daerah .secara spesifik dapat diidentifikasi bahwa level organisasi Badan Penghubung dapat mendorong efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah.
2. Terbatasnya kewenangan yang di berikan kepada pada Badan Penghubung di Jakarta
3. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan Promosi Budaya dan Pariwisata
4. Kurangnya usaha pengenalan Kesenian dan Budaya Maluku di tingkat Nasional.

Masalah yang bersifat internal antara lain :

- a. Masih belum terpenuhinya Sumber Daya Aparatur yang handal dalam menangani berbagai persoalan yang terkait dengan pelayanan sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Maluku di Jakarta.
- a. Peningkatan eselon Badan Penghubung Maluku
Kapasitas Jabatan Kepala Badan Penghubung Maluku yang saat ini masih berstatus eselon III secara struktural dapat melemahkan fungsi dan kinerja kelembagaan Badan Penghubung Daerah. mengingat tugas dan fungsi Badan Penghubung di Jakarta sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dan sebagai Perpanjangan tangan tugas-tugas Pemerintah Daerah di Jakarta.
- b. Belum maksimalnya Promosi Daerah karena tidak optimalnya pengembangan Promosi Daerah akibat dari tidak bersinerginya Kabupaten /Kota dan Provinsi.
- c. Kurangnya pengenalan Budaya Maluku yang mengakibatkan tidak optimalnya pengembangan Promosi Budaya. Ketersediaan Sanggar Kesenian dan Budaya Maluku pada Anjungan Daerah di rasa sangat penting terhadap hal ini.

Masalah yang bersifat Eksternal :

- a. Belum dipahami secara baik tentang arti pentingnya Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta.
- b. Masih belum optimalnya koordinasi yang dilakukan oleh setiap OPD pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di Jakarta.

- c. Belum maksimalnya pemanfaatan fungsi Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta sebagai Perwakilan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta.

3. Dampaknya terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah

Kapasitas Jabatan Kepala Badan Penghubung Provinsi yang saat ini masih berstatus eselon III, Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan ketidaksinerginya Provinsi dengan Kabupaten/Kota yang dalam hal ini Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dengan Kabupaten /Kota dalam melakukan promosi secara bersama-sama akan menghambat misi Kepala Daerah untuk mewujudkan Masyarakat Maluku yang sejahtera dalam pengertian tidak terpenuhinya standard pelayanan minimal (SPM) , penguatan peningkatan ekonomi daerah, membina Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah serta kerukunan intern umat beragama, yang merupakan bagian daripada misi Kepala Daerah.

4. Tantangan dan Peluang

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta yaitu ;

Untuk Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta maka perlu adanya Analisa Lingkungan Strategis. Analisa Lingkungan Strategis menjadi sangat penting untuk mengetahui tantangan dan peluang yang spesifik dan berbagai peringatan awal yang mengingatkan kita akan faktor atau unsur yang akan membahayakan dimasa depan.

Untuk menganalisa lingkungan strategis yang berpengaruh, dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu melalui *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)*.

Langkah awal dalam analisis *SWOT* adalah memahami apa saja faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang ada melalui proses identifikasi untuk memberikan gambaran faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat tercapainya tujuan .

Analisa Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan)

1. Strengths (Kekuatan)

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai tujuannya. Kekuatan-kekuatan yang dimiliki Badan Penghubung Maluku di Jakarta yaitu :

1. Adanya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 12 tahun 2017
2. Adanya komitmen untuk meningkatkan eselonering Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Maluku di Jakarta.
3. Adanya dukungan yang besar dari Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Maluku.
4. Adanya dukungan jumlah pegawai yang dimiliki.

2. Weaknesses (Kelemahan)

Kelemahan adalah situasi kekurangmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat / gagal mencapai sasarnya, selain memiliki kekuatan Badan Penghubung Provinsi

Maluku di Jakarta juga memiliki kelemahan yang dapat menjadi penghambat untuk mencapai tujuan kelemahan tersebut yaitu :

1. Kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai.
2. Masih kurangnya sumber daya aparatur yang handal.
3. Keterbatasan dana yang ada pada Badan Penghubung.
4. Keterbatasan kewenangan yang diberikan kepada Badan Penghubung.

TABEL 2.3 ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL

NO.	KEKUATAN (S)	NO.	KELEMAHAN (W)
1.	Adanya Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2017.	1.	Keterbatasan kewenangan yang diberikan kepada Badan Penghubung
2.	Adanya komitmen yang kuat untuk peningkatan eselonering Badan Penghubung Provinsi Maluku	2.	Belum Aturan Pendukung
3.	Adanya dukungan yang besar dari Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Maluku.	3.	Kondisi sarana dan prasarana yang belum representatif dan memadai.
4.	Adanya dukungan jumlah pegawai yang di miliki	4.	Masih kurangnya sumber daya aparatur yang handal

Analisa Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan)

1. Opportunity (Peluang)

Adanya perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan yang domestik, pluralistik dan desentralistik secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan perubahan-perubahan terjadi di pemerintah daerah maupun masyarakat.

Keadaan tersebut memberikan peluang atau kesempatan bagi Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta untuk mengembangkan segala upaya demi kemajuan daerah. Peluang atau kesempatan tersebut yaitu :

1. Teknologi informasi yang berkembang sangat cepat memudahkan dalam mengakses data dan informasi.
2. Adanya peluang untuk menggali obyek retribusi daerah yang baru.
3. Adanya bintek-bintek dan pendidikan dan latihan.
4. Kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah Pusat, Lembaga, Media. LSM. Asosiasi dan Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota diseluruh Indonesia.

2. Threats (Ancaman)

Selain peluang atau kesempatan yang ada, terdapat pula ancaman-ancaman yang dapat menyebabkan adanya kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan pemerintah.

Ancaman-ancaman yang dihadapi Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta yaitu :

1. Adanya tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

2. Kurangnya koordinasi dengan OPD dan Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan tugas.
3. Kurangnya kesadaran akan arti dan peran penting dari Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta.
4. Belum adanya dukungan Mendagri dalam peningkatan eselonering Badan Penghubung Provinsi Maluku yang kemudian diikuti oleh Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah.

TABEL II ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL

No	Peluang (O)	No.	Ancaman (T)
1.	Teknologi informasi yang berkembang sangat cepat memudahkan dalam mengakses data dan informasi.	1.	Adanya tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja Pemerintah Daerah
2.	Adanya peluang untuk menggali obyek retribusi daerah yang baru.	2.	Kurangnya koordinasi dengan OPD dan Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan tugas.
3.	Adanya bintek-bintek dan pendidikan dan latihan	3.	Kurangnya kesadaran akan arti dan peran penting dari Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Maluku di Jakarta
4.	Kesempatan melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah Pusat, Lembaga, media, LSM / Asosiasi dan Pimpinan Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota diseluruh Indonesia	4.	Belum adanya Peraturan Daerah yang mendukung peningkatan eselonering Badan Penghubung Provinsi Maluku .

Dari hasil analisa SWOT dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Badan Penghubung Maluku di Jakarta, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Maluku di Jakarta yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan dimasa mendatang sebagai berikut :

1. Membuat perumusan kebijakan tentang peningkatan eselonering sebagai Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta.
2. Menyusun pedoman mengenai kegiatan yang akan diadakan pada Anjungan Daerah.
3. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Maluku di Jakarta.
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait.

Strategi dan kebijakan yang akan pada Badan Penghubung Provinsi Maluku pada tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan Sumber Daya Aparatur (SDA) melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan dan kecakapan ;
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisien.

2. Strategi Membangun Koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh hasil yang terbaik untuk kepentingan pemerintah daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka mewujudkan suatu kerjasama yang optimal;
 - b. Melaksanakan hubungan yang terintegrasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya.

3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan kualitas sebagai Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta.
 - b. Memanfaatkan seluruh potensi yang ada pada Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta .

3. Tantangan dan peluang :

Tantangan :

- a. Lemahnya fungsi dan kinerja kelembagaan yang disebabkan oleh kapasitas Jabatan Kepala Badan yang tidak sesuai dengan beban kerja yang dihadapi
- b. Belum optimalnya kualitas kemampuan Sumber Daya Aparatur ;
- c. Masih terbatasnya kewenangan yang diberikan pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta ;
- d. Masih belum dipahaminya akan arti penting fungsi dan kedudukan Badan Penghubung Provinsi Maluku sebagai perwakilan daerah di Jakarta.
- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Maluku belum cukup memadai
- f. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan program-program di bidang promosi.

Peluang :

- a. Lokasi Kantor perwakilan yg berada di Ibukota Jakarta memberikan peluang untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Bimbingan dan pelatihan pada pusat-pusat pelatihan yang ada di Jakarta

- b. Banyaknya organisasi masyarakat Maluku di Jakarta yang dapat diibatkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Jakarta.
- c. Peningkatan sarana prasarana perkantoran dapat dilakukan dengan standar harga Jakarta yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan standard harga Provinsi Maluku
- d. Adanya dukungan Badan pengelola Taman Mini Indonesia Indah untuk mempromosikan Maluku melalui program-program yang di biayai Yayasan Harapan Kita Jakarta.

4. Isu-isu penting :

- 1. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Aparatur sesuai Tugas pokok dan fungsi.
- 2. Peningkatan pengelolaan sistem manajemen Keuangan
- 3. Peningkatan sarana prasarana Kantor
- 4. Optimalisasi Investasi dan pemanfaatan aset dan barang milik Daerah
- 5. Optimalisasi Pelaksanaan Koordinasi antar Daerah, Masyarakat dan Lembaga Pemerintah
- 6. Optimalisasi pengembangan promosi budaya dan pariwisata
- 7. Peningkatan pembinaan kelompok kesenian Maluku pada anjungan daerah
- 8. Optimalisasi pelayanan bidang keprotokoleran

4.2.2. Program Prioritas Daerah

Program –Program Prioritas Daerah yang mengakomodir kegiatan- kegiatan prioritas adalah sebagai berikut;

- 1. Program pengembangan Nilai Budaya
 - a. Kegiatan Pembinaan seni Budaya
- 2. Program Pengembangan Pariwisata Daerah
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Event Pariwisata
- 3. Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan
 - a. Kegiatan Kerjasama Antar Daerah
 - b. Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga

D. Review Usulan Program Kegiatan

Perbandingan Program kegiatan Badan Penghubung Maluku pada rancangan awal RKPD perlu dilakukan agar dapat diketahui apakah kebutuhan yang ada pada Badan Penghubung sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD ataukah perlu ada pengurangan atau penambahan baik program maupun kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis Kebutuhan Program kegiatan yang ada dirasakan telah memenuhi kebutuhan yang ada Badan Penghubung Provinsi Maluku. Hanya ada penambahan beberapa kegiatan yang dirasa perlu untuk ditambahkan dalam program-program tersebut. setelah di analisa dan seiring dengan berjalannya waktu dan kebutuhan terdapat bahwa Badan Penghubung Provinsi Maluku perlu memasukan Program/kegiatan baru demi kelancaran tugas dan fungsi Badan

Penghubung Provinsi di Jakarta Yang Sesuai Dengan Program Prioritas Daerah Yang telah di sesuaikan dengan RPJMD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

a. Tujuan dan sasaran Renja Badan Penghubung

Penyusunan rencana kerja (Renja) Badan Penghubung Provinsi Maluku ini mengacu pada Renstra Badan Penghubung Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 yang bertujuan untuk memberikan landasan dan arah kebijakan teknis operasional kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran yang tercermin dalam RENSTRA Badan Penghubung Provinsi dan mengacu pada Visi Misi Pemerintah Daerah sebagai perluasan program agar dapat mencapai hasil secara optimal dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penanggulangan dan pengawasan.

b. Program dan Kegiatan

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Yaitu :

- a. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah , Badan Penghubung Provinsi sebagai duta Daerah yang berada di Jakarta mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan Kepala Daerah dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun melayani Masyarakat Maluku yang ada di Jakarta.
- b. Pendayagunaan potensi ekonomi Daerah
Badan Penghubung Provinsi sebagai pusat informasi, juga sebagai pintu gerbang Daerah yang ada di Pusat, mempunyai peranan dalam mempromosikan Daerah agar dapat menarik investor untuk datang dan berinvestasi di Daerah.
- c. Mengutamakan Program-Program Prioritas Daerah yang telah ditetapkan.

B. Rekapitulasi Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah Program dan kegiatan adalah 2 Program, 11 kegiatan dan 39 sub Kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKP
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD .

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
5. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Sub Kegiatan Pengamanan barang Milik Daerah
- c. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

5. Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- d. sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- b. Pengadaan Mebel
- c. Pengadaan Sarana Prasarana Gedung kantor dan bangunan Lainnya
- d. Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- d. sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya.

9. Kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan

10. Kegiatan Adminidtrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS

2. Program Pelayanan Penghubung

11. Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
- b. Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
- d. Sub Kegiatan Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

C. Lokasi Program keseluruhannya berada di Jakarta

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

D. Total kebutuhan dana sebesar Rp. 10.758.130.000,-

P E N U T U P

Untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan, maka kebijakan dan program- program harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar tujuan dan cita-cita yang tertuang dalam visi dapat tercapai, oleh karena itu Badan Penghubung Provinsi harus melakukan perencanaan secara menyeluruh, tidak hanya dari segi program dan kegiatan saja namun juga meliputi penyediaan dana melalui APBD dalam rangka membiayai program dan kegiatan.

Dengan ditetapkannya Renstra Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2019 - 2024 maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Fungsi Renstra dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan:

Rencana Kerja Tahunan sebagai proses penyusunan rencana kerja, merupakan penjabaran dari sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan Renstra dengan mengutamakan Prioritas Daerah serta Program dan kegiatan Prioritas Daerah.

Sehingga penyusunannya harus berpedoman kepada Renstra dan sesuai dengan tahun pelaksanaan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Fungsi Renstra untuk evaluasi kinerja LKIP OPD :

LKIP OPD adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan secara periodik.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran, perlu melakukan pengukuran secara kualitatif atau kuantitatif mediator kinerja. dapat digambarkan dalam tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang dicapai melalui indikator kinerja dapat meyakinkan perkembangan/kemajuan atau kegagalan kinerja, dengan demikian indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra mempunyai peranan penting untuk mencapai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rencana strategis Badan Penghubung Provinsi tahun 2019-2024, seluruh pegawai mulai dari staf harus mengetahui/mengerti visi, misi tujuan sasaran kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan melaksanakan serta berkewajiban untuk melaksanakannya sehingga apa yang telah disepakati dan ditetapkan dalam visi Badan Penghubung Provinsi dapat terlaksana.

Jakarta, Maret 2022

KEPALA BADAN
PENGHUBUNG PROVINSI

Saiful Indra Patta, S.STP, M.Si

NIP. 19790320 199810 1 001